



Pengelola Terminal Giwangan Kelimpungan

Anggaran Tersedia hanya Cukup untuk Bayar Listrik

JOGIA – Karut marut masalah pengelolaan Terminal Giwangan di Kota Jogja terus menuai polemik. Keamanan lingkungan terminal pun dipertanyakan. Menyusul belum digantinya enam kamera *closed circuit television* (CCTV) di dalam area terminal yang rusak.

Kisruh pengelolaan terminal tipe A itu terus berkepanjangan sejak dilakukan alih kelola dari Pemkot Jogja kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan Bhakti Zunanta Bhakti mengungkapkan, ketidakjelasan anggaran dari Kementerian Perhubungan makin meruwetkan benang kusut pengelolaan terminal. »

▶ Baca *Pengelola...* Hal 7

Secara anggaran kami tak lagi menyiapkan karena sudah jadi kewenangan pusat,"

Bhakti Zunanta Bhakti
Koordinator Satuan Pelayanan Terminal Giwangan

Tak Semua Aset Dilimpahkan ke Pusat

■ PENGELOLA...
Sambungan dari hal 1

Pihaknya tidak mungkin mengganti fasilitas yang rusak, karena memang tak ada pos anggarannya. Kementerian Perhubungan tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk perawatan sarana dan prasarana. Anggaran yang tersedia hanya untuk kegiatan operasional harian. "Itu pun hanya cukup untuk membayar kebutuhan listrik, kebersihan, air, dan pengelolaan sampah," bebarnya kemarin (11/8).

Dikatakan, keenam CCTV yang tak berfungsi karena bagian adaptornya rusak. Padahal, keenam CCTV tersebut terpasang di titik-titik strategis. Di antaranya, di area kedatangan, keberangkatan, dan ruang tunggu.

Saat ini anggota satuan pelayanan terminal hanya bisa mengadukan 11 CCTV yang masih berfungsi. "Sudah lama rusaknya (CCTV). Sampai sekarang belum ada yang mengaku bertanggung jawab untuk menggantinya," lanjutnya. Untuk mengantisipasi tindak kriminalitas, Bhakti memaksimalkan sistem penjagaan keliling petugas lapangan. Secara periodik petugas melakukan patroli ke semua kawasan terminal.

Selain CCTV, alat pembersih suara untuk menyampaikan informasi kepada penumpang juga rusak dan belum diganti.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jogja Wirawan Haryo Yudho mengaku telah mendengar adanya kerusakan CCTV dan fasilitas lain Terminal Giwangan. Kendati demikian, dia berdalih tak bisa melakukan tindakan apapun karena pengelolaan terminal saat ini menjadi kewenangan Kemenhub. Meskipun saat ini masih rentang masa transisi, dimana pemkot berperan sebagai pengelola sementara. "Tapi secara anggaran kami tak lagi menyiapkan karena sudah jadi kewenangan pusat," kilahnya.

Parahnya, kisruh alih fungsi terminal membuat pengelola tak lagi bisa memungut retribusi. Sejak 1 Januari lalu di Terminal Giwangan dinyatakan bebas retribusi. Melalui retribusi peron tuang tunggu, mobilisasi bus, hingga penyewaan kios dan jasa penitipan kendaraan bermotor.

Menurut Wirawan, pemkot tak lagi punya dasar untuk memungut retribusi selama Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2016 belum direvisi. PP tersebut mengatur

tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Padahal, potensi pendapatan dari sektor retribusi Terminal Giwangan cukup menggiurkan. Saat dikelola Pemkot Jogja, terminal yang berlokasi di Ring Road Selatan itu mampu memungut pendapatan hingga Rp 3 miliar per tahun.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Kota Jogja Zenni Lingga membenarkan jika status pengelolaan Terminal Giwangan belum sepenuhnya diambil alih pemerintah pusat. Alih fungsi terminal terkendala beberapa aspek pelimpahan yang berhubungan dengan status kepemilikan aset dan sarana pendukung fungsi terminal. Seperti personel (tenaga kerja), pembiayaan, perlengkapan, dan dokumen. Menurutnya, aset yang akan dilimpahkan ke pusat berupa tanah, bangunan, meja, kursi, dan perlengkapan fungsi terminal. "Itu saja," ucapnya singkat.

Kantor Dinas Perhubungan Kota Jogja dan taman lalu lintas yang ada di kawasan terminal bukan termasuk aset yang dilimpahkan ke pusat. (pra/yog/ff)

TOLEVAWATI,
Plt. Kepala Sekretaris

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Bagian Tapem dan Kesra			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005